

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan sebagai elemen yang berharga dalam kehidupan kita, yang mana dapat diartikan bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkan dan diharapkan untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Setiap negara mengupayakan pelaksanaan pendidikan secara maksimal agar tercapai sebuah kesejahteraan dan pemerataan terutama dalam pendidikan. Di Indonesia seperti yang tertuang pada (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang berbunyi “Setiap masyarakat negara berhak mendapat pendidikan. Setiap rakyat negara wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah harus membiayainya” dijelaskan bahwa pendidikan menjadi hak mutlak bagi seluruh masyarakat Indonesia dan negara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan untuk setiap rakyat negara.

Widodo (2021) menyatakan tingkat pendidikan di Indonesia berkaitan erat dalam perkembangan di era industrialisasi. Perkembangan industrialisasi menuntut tenaga kerja profesional dalam bidang-bidang khusus yang terkategori. Negara Indonesia dalam usaha memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan telah diatur dalam (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945),

(Undang-undang No. 20 Tahun 2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Undang-undang No. 20 Tahun 2003) berisikan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 -15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Kemudian direvisi bahwa Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional untuk terwujudnya program wajib belajar 12 tahun. Penyelenggaraan pendidikan ini dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), selanjutnya Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pada awal Juli tahun 2005, BOS mulai diluncurkan digunakan sebagai dana bantuan untuk sekolah yang bertujuan agar sekolah membebaskan biaya pendidikan ataupun meringankan tagihan biaya sekolah, dan juga supaya kualitas proses pembelajaran di sekolah akan menjadi semakin meningkat. Besaran dana yang diterima tiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah dan satuan dana BOS SMA. Waktu penyaluran dana BOS SMA ini diberikan ke sekolah persemester. Pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada petunjuk teknis BOS SMA yang diterbitkan oleh direktorat pembinaan SMA, sebagai teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS SMA (Hartatik, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler diatur mengenai sistem tata cara penerimaan dana, alokasi dana serta pengelolaan pelaporan dan tanggung jawab penggunaan dana BOS. Untuk menjembatani pihak

sekolah dalam pengambilan serta pencairan dana BOS ini disusun suatu aplikasi yang biasa disebut Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Data Pokok Pendidikan adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus-menerus diperbarui secara online (Wahyuni et al., 2018).

Proses pencairan dana dari pemerintah pusat ke sekolah pun menjadi isu yang menarik bagi penulis untuk dibahas. Hal ini dikarenakan proses pencairan dana dari pemerintah pusat ke sekolah merupakan gerbang pertama dan utama agar terealisasinya proses pengalokasian dana BOS di lingkungan sekolah tersebut. Menurut penjelasan singkat dari salah satu staff di SMA Negeri 1 Bululawang, pernah terjadi keterlambatan dalam pencairan dana bos. Proses pencairan dana BOS yang tidak kunjung selesai dijadikan alasan keterlambatan penyaluran fasilitas penunjang pendidikan tersebut. Kemudian dalam hal prosedur pemindahan dana BOS bagi siswa dan siswi yang pindah dari sekolah, masih sering menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme pemindahan data dan dana pada pertengahan tahun anggaran. Hal ini menggugah penulis untuk mengangkat proses pencairan dana BOS dari pemerintah pusat pada Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul "TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SMA NEGERI 1 BULULAWANG KECAMATAN BULULAWANG".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pencairan dana BOS di SMA Negeri 1 Bululawang?
2. Bagaimana prosedur pemindahan atau update data siswa yang pindah dari sekolah SMA Negeri 1 Bululawang?
3. Apa faktor penyebab keterlambatan dari pencairan dana BOS di SMA Negeri 1 Bululawang?
4. Bagaimana proses penanganan dana BOS bagi sekolah yang terlambat melakukan pengisian data Dapodik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam menyusun karya tulis ini diantaranya:

1. Mengetahui prosedur pencairan Dana BOS di SMA Negeri 1 Bululawang.
2. Mengetahui prosedur pemindahan atau update data siswa yang pindah dari SMA Negeri 1 Bululawang.
3. Mengetahui faktor yang menyebabkan keterlambatan dari pencairan dana BOS di SMA Negeri 1 Bululawang.
4. Mengetahui proses penanganan dana BOS bagi sekolah yang terlambat melakukan pengisian data Dapodik.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini mencakup proses pencairan dana BOS dari Pemerintah Pusat ke SMA Negeri 1 Bululawang serta membandingkan dengan peraturan yang sudah ditetapkan dengan praktinya di

lapangan dan hanya terbatas dengan data yang digunakan data yang terdapat pada tahun 2021 dan dibandingkan dengan peraturan pada tahun yang bersangkutan, pembahsan yang dilakukan sebatas pada proses pencairan dana dari pemerintah pusat ke SMA Negeri 1 Bululawang.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan karya tulis ini adalah:

1. Bagi penulis, karya tulis tugas akhir ini bermanfaat karena memberikan pengalaman bagi penulis untuk menambah pengalaman tentang proses pencairan dana BOS dan praktik langsungnya di SMA Negeri 1 Bululawang.
2. Bagi SMA Negeri 1 Bululawang, Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan bisa menjadi masukan dan evaluasi terkait Proses Pencairan Dana BOS.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang pernyataan umum Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh penulis. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang serta tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis tugas akhir. Selain itu penulis juga menguraikan ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data yang relevan dan menganalisisnya, serta menguraikan sistematika penyajian dari karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan teori-teori yang melandasi penulisan, serta peraturan-peraturan yang melekat pada topik pembahasan dari karya tulis. Peraturan-peraturan yang dibahas yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan gambaran mengenai objek dalam penulisan karya tulis ini. Pada bab ini penulis memaparkan gambaran umum SMA Negeri 1 Bululawang yang meliputi profil singkat, visi misi, serta struktur organisasi. Bab III juga berisi hasil pembahasan atas topik karya tulis yaitu tinjauan atas proses pencairan dana BOS dari pemerintah pusat pada SMA Negeri 1 Bululawang. Hasil pembahasan ini didasarkan pada landasan teori dari berbagai peraturan dan analisis data yang bersumber dari SMA Negeri 1 Bululawang. Pada bagian ini penulis juga akan menjelaskan tentang variabel-variabel yang digunakan. Kerangka pemikiran, hipotesis, serta pembahasan atas data-data yang didapat.

BAB IV SIMPULAN

Merupakan bagian penutup dari karya tulis Tugas Akhir. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil tinjauan atas proses pencairan dana BOS dari pemerintah pusat pada SMA Negeri 1 Bululawang tahun 2021.